

KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



Mengungkap Investasi Emas Bodong



Foto : Booth Bappebti di arena Raker Nasional Kementerian Perdagangan, menjadi salah satu tujuan peserta untuk mengetahui lebih dalam tentang perdagangan berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang.

Kalangan pemerhati perdagangan komoditi emas menganalisa dan menyimpulkan, anjloknya harga emas di pasar internasional akan berdampak pada sulitnya likuiditas bagi perusahaan yang menjanjikan keuntungan tetap kepada para nasabahnya. Akibatnya, anjloknya harga emas itu menjadi salah satu 'sumbu peledak' larinya komitmen sejumlah perusahaan investasi emas dan merugikan masyarakat hingga triliunan rupiah.

Janji-janji keuntungan besar dan penghasilan tetap dari investasi emas, tampaknya masih strategi jitu bagi sejumlah pihak untuk mengelabui masyarakat. Di sisi lain, rendahnya pengetahuan terhadap investasi emas membuat masyarakat terbuai dengan janji-janji kosong.

Awal Maret tahun ini, muncul kepermukaan kasus larinya komitmen perusahaan investasi emas yang sudah tidak sanggup lagi membayarkan 'keuntungan' bagi nasabahnya. Peristiwa itu sejatinya tinggal menunggu waktu untuk meledak. Sebab, ditinjau dari berbagai sisi mana pun, modus investasi emas yang menjanjikan keuntungan tetap atau komisi tinggi yang melebihi presentase investasi umum, tidak logis dan rasional. Apalagi, perusahaan investasi emas itu tidak memiliki legalitas formal yang resmi dikeluarkan lembaga berwenang.

Umumnya, perusahaan itu hanya mengantongi SIUP, sedangkan legalitas dari lembaga pengawas tidak dimiliki. Hal itu pun sangat disadari oknum perusahaan, karena jika meminta izin dari lembaga pengawas maka sederet ketentuan tidak mungkin bisa dipenuhinya.

Alih-alih, memperoleh dukungan dari lembaga formal keagamaan atau dekat dengan pejabat dan tokoh nasional menjadi salah satu trik meyakinkan masyarakat akan investasi tersebut.

Kejadian larinya komitmen sejumlah

perusahaan investasi emas yang tidak sanggup membayar keuntungan kepada konsumen, sesungguhnya bukan hal baru di tanah air. Peristiwa serupa juga pernah terjadi pada investasi komoditi pertanian yang ditawarkan PT Qurnia Subur Alam Raya di Sukabumi, Jabar, sekitar tahun 1999.

Dikalangan pemerhati investasi, modus pengumpulan dana masyarakat yang menjanjikan keuntungan besar atau tingkat bunga tinggi dikenal dengan skema Ponzi. Modus itu senantiasa akan berkembang subur ketika tingkat penghasilan masyarakat menengah mengalami pertumbuhan. Tetapi di sisi lain, pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap investasi sangat rendah.

Dalam kaitan itu, Bappebti sebagai salah satu regulator di bidang investasi perdagangan berjangka komoditi di tanah air, senantiasa mengingatkan masyarakat bahwa pentingnya mengetahui legalitas perusahaan yang menawarkan investasi.

Di samping itu, Redaksi pun mengingatkan masyarakat yang harus jeli dengan berbagai janji-janji yang ditawarkan sejumlah pihak. Sebab, di mana pun tidak ada investasi tetap yang menjanjikan keuntungan besar melebihi tingkat suku bunga bank.

Bagaimana sikap Bappebti terkait dengan merebaknya kasus investasi emas bodong, Redaksi menyajikan liputannya pada edisi ini.

Sajian lain dari Redaksi yang tak kalah penting adalah adanya keinginan kuat dari Wamendag, Bayu Krisnamurthi, menjadikan Kab. Grobogan sebagai tolak ukur harga dan perdagangan komoditi jagung untuk tingkat nasional.

Apa alasannya? Redaksi sudah merangkumnya pada rubrik Berita Utama.

Salam!

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE

KONTRAK
BERJANGKA
MENGAJARI DENGAN INTEGRITAS



Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggung Jawab

Syahrul R. Sempurnajaya

Pemimpin Redaksi

Nizarli

Wakil Pemimpin Redaksi

Subagiyo

Dewan Redaksi

Pantas Lumban Batu, Agus
Muharni S., Harry Prihatmoko,
Diah Sandita Arisanti, Poppy
Juliyanti, Erni Artati, Sri
Haryati, Rizali Wahyuni

Sirkulasi

Apriliyanto, Katimin, Umar
Hasan.

Alamat Redaksi

Gedung Bappebti Jl. Kramat
Raya No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel
ataupun opini dikirim lengkap
dengan identitas serta foto ke
E-mail:

buletin@bappebti.go.id



Berita Utama.....4-7

- Mengungkap Investasi Emas Bodong
- Grobogan Patokan Perdagangan Jagung Tingkat Nasional

Berjangka9-10

- Evaluasi Kinerja PBK

Resi Gudang.....11

- SRG Dompu Aspirasi Petani

Pasar Lelang.....12-13

- Bali 2014 PLKA Online

Agenda Foto14-15

Aktualita.....16-17

- Peluncuran Kontrak Batuabara JFX Tunggu Kesiapan Pelaku
- Izin QF Permanen Dicabut
- Izin Usaha JTB 'Seumur Jagung' Dibekukan Bappebti
- Izin RF Dibekukan 'Tidak Cakap' Sebagai Pialang
- Penyegaran WPB Belum Optimal

Analisa.....19

Breaknews.....20

Info SRG.....20-21

Kolom.....24-25

- Menegal Lebih Dalam Analisis Fundamental

Tips 7P

- 1). Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan anda bertransaksi;
- 2). Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
- 3). Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
- 4). Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
- 5). Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
- 6). Pelajari risiko-resiko yang dihadapi.
- 7). Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.

Berita Utama...8

Gudang SRG Pengontrol Harga Komoditi



Wawasan...22-23

Persiapan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang



Kiprah...26-27

Multilateral akan 'Sikut' Kontrak Bilateral





Mengungkap Investasi Emas Bodong

Bappebti bukanlah sebagai regulator perusahaan-perusahaan investasi emas bodong. Pasalnya, investasi fisik emas tidak termasuk dalam skema perdagangan berjangka komoditi seperti diatur UU No.10 Tahun 2011.

Kasus penipuan berkedok investasi menjadi hangat kembali. Seakan tak pernah usai, kasus penipuan berkedok investasi muncul silih berganti. Modusnya tak jauh berbeda, hanya subjek komoditinya saja yang berbeda. Misalnya, penipuan tawaran investasi untuk komoditi pertanian yang lebih dulu dikembangkan PT Qurnia Subur Alam Raya (QSAR). Kini, kembali marak perusahaan di bidang investasi yang banyak merugikan masyarakat khususnya di bidang perdagangan fisik emas.

Kasus terbaru yakni tawaran investasi emas dari Raihan Jewellery, diketahui perusahaan ini telah merugikan nasabahnya. Sejak beroperasi tahun 2010, Raihan Jewellery diperkirakan telah

mengumpulkan dana masyarakat tak kurang dari Rp 13,2 triliun. Dana sebesar itu terkumpul lewat penjualan 2,2 ton emas.

Selain Raihan, tawaran investasi emas Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) juga diduga telah melakukan penipuan dan merugikan nasabahnya hingga Rp 600 miliar. Uniknya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut memberikan rekomendasi produk investasi emas tersebut melalui pemberian sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Terkait itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku regulator Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia, dengan tegas membantah sebagai regulator pe-

rusahaan-perusahaan investasi tersebut.

“Kegiatan di bidang investasi emas tersebut sangat berbeda dengan skema transaksi yang dilakukan dalam bidang perdagangan berjangka komoditi,” kata Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, awal Maret 2013 lalu, kepada wartawan.

Skema tersebut, tegas Syahrul, sangat berbeda dengan sistem transaksi yang sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, tentang perubahan atas UU No 32. Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

“Investasi emas itu hanya jual beli perdagangan fisik emas bukan dalam sistem perdagangan berjangka. Jadi, kami pastikan bahwa jenis usaha dan seluruh kegiatan dari perusahaan terse-



“
Investasi emas itu
hanya
jual beli
perdagangan fisik
emas bukan
dalam sistem
perdagangan
berjangka.
”



Pengamat Ekonomi INDEF, Aviliani.

but tidak ada hubungannya sama sekali berbeda dengan perdagangan berjangka, yang berada di bawah Pengawasan Bappebti, Kementerian Perdagangan,” tegasnya.

Skema Ponzi

Meski demikian, Syahrul mengungkapkan, pihaknya sudah lama mengamati gejala investasi bodong ini. Dari pantauan Bappebti, ada beberapa perusahaan investasi di bidang perdagangan emas antara lain Raihan Jewellery, Golden Trader Indonesia Syariah, Virgin Gold Mining Corporation, dan Trimas Mulia.

“Mereka menggunakan strategi bonus atau *fixed income* setiap bulannya selama periode tertentu kepada setiap investor. Jelas ini di luar ranah Bappebti, kalau kita ‘kan menggunakan margin, itupun oleh perusahaan-perusahaan

pialang yang memperoleh izin resmi,” jelasnya.

Syahrul mencontohkan, skema perdagangan yang dilakukan oleh Raihan Jewellery sebenarnya merupakan transaksi fisik emas biasa, di mana harga emas yang ditawarkan 20 %-25 % lebih mahal dari harga pasar fisik biasa atau harga logam mulia yang dihasilkan PT Antam. “Dalam skema ini, pihak perusahaan memberikan bonus atau *fixed income* setiap bulannya selama periode tertentu kepada setiap investor.”

Skema yang dilakukan selanjutnya, papar Syahrul, adalah dengan investasi emas non fisik. “Artinya, emas yang telah dibelikan oleh investor dititipkan kembali kepada Raihan Jewellery dan nasabah memegang bukti pembayaran dan surat perjanjian investasi, dengan kontrak investasi berdurasi 6 bulan atau 12 bulan. Dan, bonus tetap bulanan 4,5 %

dan 5,4 % dari nilai investasi nasabah.”

“Jika masa kontrak berakhir, nasabah bisa menjual kembali emas tersebut kepada Raihan Jewellery seharga pembeli awal,” terang Syahrul.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Raihan Jewellery, ungkap Syahrul, sebenarnya sudah banyak dilakukan di Indonesia, seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu pada PT. QSAR, perusahaan bidang perkebunan di Sukabumi. Perusahaan tersebut mengajak masyarakat untuk berinvestasi dengan modus operandi yang sama seperti Raihan Jewellery.

“Semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh Raihan Jewellery atau perusahaan sejenisnya diduga kuat menggunakan skema money game atau skema Ponzi, yaitu memutar dana nasabah dengan cara membayar bonus nasabah lama dengan uang dari nasabah baru. Hal ini terus berlangsung hingga jumlah dana dari nasabah baru tak bisa lagi menutupi pembayaran bonusnya,” ungkap Syahrul.

Tanpa Jaminan

Untuk itu, Syahrul mengingatkan, agar masyarakat waspada jika ingin terlibat dalam bisnis tersebut. Bappebti menilai kegiatan perusahaan investasi fisik emas yang marak di masyarakat telah menjadi modus operandi yang bisa dikategorikan sebagai penipuan dan penggelapan.





Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya saat memberi penjelasan kepada wartawan terkait investasi emas bodong.

“Mereka hanya memegang SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dan rekomendasi MUI. Tapi, janji fixed income dari swasta ini bahaya, karena tidak ada jaminannya,” jelas Syahrul.

“Kalau ingin lebih aman dan terjamin, depositokan saja di Bank Syariah atau melakukan trading di bursa komoditi yang jelas-jelas ada lembaga pengamannya,” pesan Syahrul.

Dan tentu saja, guna memberikan perlindungan kepada masyarakat, Syahrul berharap, agar berbagai jenis kegiatan investasi yang merugikan masyarakat tersebut dapat ditertibkan oleh pihak yang berwajib dan Satgas Waspada Investasi. Satgas tersebut diketuai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan beranggotakan Kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bappebti, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Siapa Regulatornya?

Pengamat Ekonomi INDEF, Aviliani, menilai, produk-produk investasi yang belum mendapatkan

izin baik itu dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau Kementerian Keuangan (Kemenkeu), maka produk tersebut belum dapat diakui legalitasnya. Meski demikian, Aviliani mengakui, pendirian perusahaan-perusahaan investasi memiliki legalitas jika sudah berbadan hukum. Tapi masalahnya, produk yang diperjual belikan oleh perusahaan tersebut ternyata tidak memiliki izin.

“Semua kegiatan yang menghimpun dana masyarakat, harus memiliki izin dari ketiga lembaga tersebut (BI, OJK, Kemenkeu). Jadi, kalau perusahaan berbadan hukum tapi tidak memiliki izin, maka sebenarnya mereka tidak boleh melakukan transaksi produk investasi dari masyarakat. Yang boleh, umumnya mereka hanya berjualan,” papar Aviliani, di Jakarta, Maret lalu.

Meski secara tegas belum diatur dalam Peraturan Pemerintah, Aviliani cenderung melihat OJK-lah yang harus mengawasi dan memberi izin kepada perusahaan-perusahaan tersebut. “OJK ini akan memberikan pengawasan bank dan non bank. Jadi, semua produk investasi, nantinya harus OJK yang memberikan

izin dan perlindungan konsumennya,” saran Aviliani.

Terkait rekomendasi MUI melalui pemberian sertifikat syariah dari DSN, Aviliani berpendapat, MUI tidak ada kaitannya dengan izin investasi. “Dan, selama ini kita tahu, MUI hanya memberikan fatwa mana halal dan haram,” tegasnya.

“Jika dugaan penipuan oleh perusahaan investasi emas yang menggunakan rekomendasi DSN itu terjadi, maka ini akan mengorbankan produk-produk Bank Syariah, ini membahayakan,” tambahnya.

Aviliani juga menegaskan, jika sudah ada gejala yang mencurigakan dan itu sudah menyangkut dana masyarakat, harusnya pemerintah cepat mengambil tindakan agar kejadian yang merugikan masyarakat tidak terulang kembali.

“Harus ada perlindungan konsumen dari salah satu dari tiga lembaga tadi. Saran saya, tepatnya OJK harus menjemput bola, jadi OJK dengan perlindungan konsumennya harus melihat gejala-gejala seperti ini,” tandas Aviliani. ▲



Grobogan Patokan Perdagangan Jagung Tingkat Nasional

Upaya mengurangi ketergantungan jagung impor, perlu diciptakan sistem perdagangan onlien yang terintegrasi dari petani produsen, gudang SRG hingga industri pakan ternak.



Wamendag, Bayu Krisnamurthi dialog dengan industri pakan ternak Jateng.

Untuk mempertahankan harga komoditi jagung di tingkat yang wajar, pemerintah berharap para petani komoditi jagung di Kab. Grobogan, Jateng, dapat memenuhi kebutuhan perusahaan pakan ternak. Di sisi lain, jenis dan kualitas komoditi jagung harus sesuai dengan kebutuhan industri pakan ternak.

“Jika dua hal itu dapat dipenuhi para petani jagung Kab. Grobogan, saya jamin harga komoditi jagung akan berada di tingkat yang wajar, berkisar Rp 3.000 per kg,” demikian antara lain diutarakan Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, disela-sela dialog dengan pelaku industri pakan ternak di Semarang, Jateng, Kamis, 7 Maret 2013.

Lebih jauh dikatakan Bayu, industri pakan ternak di Jateng juga telah berkomitmen untuk membeli komoditi jagung petani Kab. Grobogan di atas biaya produksi. “Saya sudah bicara dengan pengurus asosiasi perusahaan pakan ternak di Jateng dan mereka berkomitmen

membeli komoditi jagung di atas biaya produksi jika harga pasar anjlok. Tetapi syaratnya, kualitas jagung harus sesuai dengan kebutuhan industri pakan ternak seperti kadar air berkisar 15 %,” jelas Bayu.

Menurut Bayu, dengan adanya komitmen perusahaan pakan ternak tersebut dan melihat potensi tanaman komoditi jagung di Kab. Grobogan, di masa mendatang Kab. Grobogan dengan dukungan produksi dari daerah sekitarnya, akan dijadikan tolak ukur perdagangan komoditi jagung di tanah air.

“Kita perlu memiliki tolak ukur harga komoditi jagung untuk tingkat nasional, dan itu saya harapkan bisa terjadi di Kab. Grobogan. Sebab daerah ini sangat potensial dengan tanaman komoditi jagung, dan letak industri pakan ternak pengguna komoditi jagung dekat dengan Kab. Grobogan,” papar Bayu.

Dijelaskan Bayu, jika kita mengacu dengan komoditi beras, di tingkat nasional tolak ukurnya adalah Pasar Induk

Cipinang. Bila di Cipinang harga beras naik atau turun, maka daerah akan mengikuti pergerakan harga pasar induk itu. ‘Nah, kita ciptakan Kab. Grobogan sebagai tolak ukur untuk tingkat nasional.

“Memang tidak mudah untuk mewujudkan itu, sebab harus ada trust dari masing-masing pihak pelaku. Tetapi jika tidak kita mulai sejak sekarang, kita tidak akan pernah memilikinya,” tegas Bayu.

Di dalam penjelasannya, Bayu mengatakan, langkah pertama membangun Kab. Grobogan sebagai tolak ukur harga komoditi jagung yakni menciptakan sistem perdagangan secara online. Sistem itu terintegrasi mulai dari petani, gudang SRG komoditi jagung hingga ke konsumen industri pakan ternak. “Dengan sistem itu, kita bisa mengetahui persediaan jagung di gudang SRG, di sisi lain kita pun tahu posisi petani jagung sedang musim tanam atau masa panen.”

“Jika kita mampu menciptakan sistem itu, saya pikir itu adalah sebuah upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor jagung. Karenanya, harus ada jaminan harga sehingga petani termotivasi menanam jagung dengan kualitas yang baik,” jelas Bayu.

Upaya menjadikan Kab. Grobogan menjadi tolak ukur perdagangan komoditi jagung di tanah air memang tidak mudah, tambah Bayu. Tetapi hal itu harus dilakukan sejak saat ini dan dampak positifnya baru akan dirasakan sekitar tiga atau lima tahun mendatang.

“Karena itu, harus ada koordinasi di antara instansi terkait di daerah dan adanya leadership pemerintah daerah yang memikirkan kesejahteraan petani,” tandas Bayu Krisnamurthi. ▲



Wamendag, Bayu Krisnamurthi memberi arahan saat dialog dengan pelaku SRG Kab. Grobogan.

Gudang SRG Pengontrol Harga Komoditi

Sistem resi gudang (SRG) yang sudah diterapkan di sejumlah daerah di Jawa Tengah, dinilai sangat menguntungkan petani terutama untuk pembiayaan dan kestabilan harga di saat panen raya tiba. Sebab itu, seluruh pihak diminta untuk bersinergi dan menjadikan gudang SRG sebagai alternatif pembiayaan murah bagi petani.

Demikian antara lain dikatakan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, saat melakukan dialog dengan pelaku SRG di Pendopo Kab. Grobogan. Sebelumnya, Wamendag juga melakukan kunjungan dan meninjau gudang SRG yang terletak di Desa Dapurno, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, Jateng, Jumat, 8 Maret 2013.

"Sebab itu kami berharap seluruh pihak baik pemerintah daerah, perbankan, asuransi, pengelola gudang, dan kelompok tani dapat bersinergi serta berperan aktif dalam upaya peningkatan implementasi SRG di Kab. Grobogan melalui pemanfaatan gudang SRG yang telah dibangun maupun gudang-gudang milik swasta yang berpotensi untuk menjadi gudang SRG," kata Wamendag.

Lebih jauh dikatakan, pada tahun 2012, Bappebti telah melakukan kegiatan pemetaan terhadap gudang milik swasta. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai jumlah gudang yang ada di 274 kabupaten di 16

provinsi di seluruh Indonesia baik yang dimiliki pemerintah maupun oleh para pelaku usaha swasta.

"Kab. Grobogan termasuk yang telah dipetakan data gudangnya dan terdapat 64 gudang yang berpotensi untuk menjadi gudang SRG. Gudang tersebut merupakan gudang yang dimiliki oleh pelaku usaha maupun koperasi yang potensial dapat dimanfaatkan sebagai gudang SRG," kata Bayu.

Mengacu data yang diperoleh dari Pemda Grobogan, wilayah ini merupakan salah satu daerah sentra produksi jagung di Provinsi Jawa Tengah, selain Kab. Demak dan Blora. Hasil produksi jagung di Kab. Grobogan mencapai 699.000 ton dengan surplus mencapai 675.000 ton.

"Karena itu saya harapkan SRG di Grobogan dan di Jateng bisa lebih ditingkatkan. Karena selain alternatif pembiayaan juga menjadi sarana pengendalian harga supaya harga tidak anjlok saat panen," terang Wamendag.

Armada SRG

Sementara itu, Kepala Disperindag Jateng, Edison Ambarora, mengatakan, untuk menarik animo petani supaya mau memanfaatkan SRG, pihaknya akan menekan kendala-kendala yang menghambat. Salah satunya yakni akan menyediakan armada untuk mengangkut hasil produksi ke gudang

SRG.

"Kami akan melengkapi armada pengangkut komoditas di setiap gudang SRG. Dengan begini akan semakin memudahkan petani," ungkap Edison.

Di pihak lain, Bupati Grobogan, Bambang Pudjiono, dalam sambutannya mengatakan, Kab. Grobogan adalah salah satu daerah sentra produksi jagung selain Demak dan Blora. Hasil produksi jagung di Kab. Grobogan mencapai 699.000 ton dengan surplus mencapai 675.000 ton.

"Sebab itu dalam menghadapi panen raya jagung pada awal tahun 2013 ini yang harganya cenderung turun, Bappebti bekerjasama dengan Pemprov Jateng dan Pemkab Grobogan akan memaksimalkan pemanfaatan gudang SRG untuk penyimpanan komoditi jagung," jelas Bambang.

Selain itu, tambahnya, beberapa industri pakan ternak juga telah berkomitmen untuk membeli hasil panen jagung dari para petani di atas harga pasar.

"Saya juga sudah mengusulkan ke Bappebti agar gudang SRG bisa menampung komoditas andalan Grobogan yang lain, berupa komoditi kedelai yang sudah menjadi komoditi andalan Grobogan dan unggulan di tingkat nasional," ujar Bambang Pudjiono. ▲



Evaluasi Kinerja Industri PBK

Kinerja industri PBK Indonesia terus mengalami peningkatan. Meski demikian, untuk melaksanakan amanat UU PBK yakni menjadikan bursa berjangka sebagai price discovery dan hedging masih dibutuhkan perjuangan panjang.

Bicara sejarah, praktik perdagangan berjangka komoditi (PBK) telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Tercatat, bursa berjangka komoditi telah dimulai di Eropa pada abad ke XII dan di Jepang dikenal pada abad ke XVII. Selanjutnya, industri PBK modern mulai berkembang pesat pada abad ke XVIII di Amerika.

Sejarah mencatat, kontrak berjangka modern pertama kali diperdagangkan di Amerika pada 13 Maret 1851, atau tiga tahun setelah bursa Chicago Board of Trade (CBOT) didirikan. Kontrak berjangka komoditi pertama itu memberi kuasa penyerahan 3.000 gantang jagung dengan harga 1 sen dolar AS per gantang.

Lantas, bagaimana dengan industri PBK di Indonesia? Menurut Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Syahrul R Sempurnajaya, industri PBK di Indone-

sia hanya baru berlangsung sekitar 13 tahun sejak berdirinya Jakarta Futures Exchange (JFX).

“Meski demikian, hingga saat ini perkembangan perdagangan berjangka terus mengalami peningkatan, hal itu ditandai dengan bertambahnya satu bursa lagi yakni Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) pada tahun 2009,” papar Syahrul dalam sambutannya di acara Monex Investor Club (MIC) 2013, di Djakarta Thearter, Jakarta, awal Maret lalu.

Dengan berdirinya dua bursa berjangka itu, kata Syahrul, diharapkan dapat mendorong peningkatan likuiditas transaksi kontrak berjangka di bursa berjangka di Indonesia. “Dan yang terpenting, bursa berjangka dapat berfungsi sebagai sarana pembentukan harga (price discovery) dan sarana lindung nilai (hedging) sekaligus sebagai sarana referensi harga bagi para produsen

dalam menetapkan harga jual produk komoditasnya,” imbuhnya.

Hal tersebut, lanjut Syahrul, karena saat ini Indonesia telah dikenal sebagai negara produsen komoditi, seperti crude palm oil (CPO), kopi, karet, kakao, lada, kopi, batubara serta timah yang merupakan primadona ekspor dan penyumbang devisa non migas.

Yang menggembirakan, perkembangan transaksi perdagangan berjangka untuk komoditi multilateral mengalami perkembangan cukup signifikan. Syahrul menjabarkan, sampai dengan akhir Desember 2012, tercatat transaksi komoditi multilateral sebesar 1.136.336 lot atau meningkat 19,45 % dibandingkan dengan dengan tahun 2011 yang hanya mencapai 951.328 lot.

Sayangnya, keluh Syahrul, jika dibandingkan dengan total volume Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) atau juga dikenal transaksi bilateral



yang mencapai sebesar 9.465.125 lot, maka kontrak multilateral hanya mencapai 12,01 %.

“Transaksi kontrak multilateral belum menunjukkan kenaikan yang cukup berarti dan masih jauh dari yang diharapkan. Pencapaian tersebut belum sesuai dengan amanat UU PBK untuk menjadikan perdagangan berjangka sebagai sarana lindung nilai dan pembentukan harga,” ungkapnya.

5 Kendala PBK

Dari kacamata Syahrul, belum likuidnya transaksi kontrak berjangka multilateral disebabkan oleh 5 faktor. Pertama, masih kurangnya partisipasi aktif pelaku pasar dalam melakukan transaksi komoditi multilateral di bursa berjangka. “Yakni, dari 62 pialang yang ada, hanya 53 % yang aktif melakukan transaksi. Sedangkan dari 20 pedagang yang aktif melakukan transaksi komoditi primer hanya 75 %,” katanya.

Kedua, masih rendahnya pengetahuan dan minat pelaku usaha komoditi, produsen atau investor terhadap penggunaan manajemen risiko dalam per-

lindungan usaha. Ketiga, masih kurangnya dukungan dan kerjasama yang baik antara bursa berjangka dengan stakeholder, asosiasi komoditi dan perguruan tinggi dalam rangka kegiatan sosialisasi dan edukasi. Keempat, masih terbatasnya tempat penyerahan dalam rangka penyerahan fisik di beberapa daerah sentra produksi.

Dan kelima, belum optimalnya penegakan hukum di bidang PBK disebabkan masih terbatasnya tenaga PPNS yang ada di Bappebti. “Untuk itu, dalam tahun 2013, Bappebti bekerjasama dengan mabes Polri akan mendidik dan merekrut tenaga PNS dari beberapa dinas terkait di daerah untuk menjadi PPNS Bappebti,” papar Syahrul.

Sebagai catatan, Kepala Bappebti telah menandatangani komitmen kinerja tahun 2013 kepada Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Komitmen tersebut diantaranya; 1) Mendorong peningkatan nilai transaksi dan jumlah lot transaksi multilateral sebesar minimum 30 % dibandingkan tahun 2012. 2) Memasukkan produk-produk baru (termasuk karet) ke bursa berjangka dengan sema-

ngat kristalisasi nilai yang akan mendukung stabilisasi maupun peningkatan nilai ekspor. 3) Melakukan kesepakatan (aliansi strategis) kerjasama dengan bursa berjangka internasional terkait sebelum akhir tahun 2013.

Selain itu, dalam rangka mendukung terlaksananya peningkatan transaksi multilateral di bursa berjangka, Bappebti telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Bappebti yang isinya, Bappebti tidak menerbitkan perizinan baru di bidang SPA yang mencakup; persetujuan sebagai peserta dan penyelenggara SPA, dan persetujuan terhadap kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah yang digunakan sebagai dasar jual beli di dalam SPA terhitung sejak 15 Maret 2013.

Sedangkan untuk perizinan dalam kegiatan berjangka multilateral, Bappebti akan membuka seluas-luasnya bagi calon investor yang akan melaksanakan kegiatan perdagangan berjangka multilateral. ▲

Monex Investor Club 2013

P.T. Monex Investindo Futures (MIF) menyelenggarakan Monex Investor Club (MIC) 2013 dengan tema Time to Trade, di Jakarta Thearther, Jakarta, 2 Maret 2013 lalu. Acara MIC merupakan salah satu program seminar sebagai bentuk edukasi seputar dinamika terbaru di industri perdagangan berjangka. Kegiatan ini, merupakan agenda tahunan MIF dan penyelenggaraannya sudah memasuki tahun ke-enam. Acara itu dihadiri pula oleh pejabat Bappebti, direksi bursa berjangka, lembaga kliring berjangka serta nasabah MIF

“Ini adalah tahun ke-enam penyelenggaraan MIC, yang merupakan bentuk layanan edukasi dan pelayanan kepada nasabah dan masyarakat,” papar Direktur Utama MIF, Samuel Semarun, dalam pembukaan acara MIC 2013.

Sementara itu, Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, mengharapkan investor atau nasabah MIF dapat ikut serta berpartisipasi aktif dalam melakukan transaksi multilateral. “Karena hal itu dapat mendorong peningkatan transaksi multilateral di bursa berjangka dan ke depannya cita-cita Indonesia sebagai price reference dapat terwujud,” imbuh Syahrul.

Acara MIC 2013, terbagi dalam 2 sesi. Sesi pertama



Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Robert J. Bintaryo berdialog dengan narasumber Monex Investor Club (MIC) 2013.

mengambil tema Market Outlook 2013, yang dibawakan pengamat ekonomi Aviliani. Dalam pemaparannya, Aviliani banyak mengemukakan pandangan-pandangannya mengenai ‘Perkembangan Ekonomi Dunia dan Prospek Ekonomi Indonesia’.

Sesi kedua, dibawakan oleh Joe DiNapoli, yang dikenal dengan The God Father of Fibonacci, dengan tema Time to Trade. Dalam pemaparannya, Joe DiNapoli memberikan tips-tips dan analisa serta pengalaman tradingnya yang sudah lebih dari 45 tahun. “Tahun 2008 menjadi tahun trading terbagus saya selama saya trading. Dan, pendekatan saya adalah menggunakan indikator leading dan indikator ini termasuk yang terbaik di dunia,” ungkap Jo DiNapoli.



SRG Dompu Aspirasi Petani



Harga terbaik saat di masa panen komoditi jagung nyaris tidak pernah dirasakan petani Dompu. SRG diharapkan sebagai solusi alternatif petani memperoleh pembiayaan murah.

Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) memprogramkan penerapan sistem resi gudang (SRG) yang diawali dengan pembangunan bangunan gudang representatif seluas 700 meter persegi. Gudang SRG tersebut direncanakan mampu menampung komoditi dengan kapasitas sebesar 3.000 ton.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Lalu Imam Maliki, di Mataram, baru-baru ini mengatakan, anggaran pembangunan gudang SRG sudah dialokasikan dananya yang bersumber dari APBN 2013 untuk pembangunan gudang representatif guna penerapan SRG di Dompu.

Imam mengemukakan hal itu ketika ditanya Gubernur NTB, TGH M. Zainul Majdi, sehubungan dengan aspirasi petani jagung di Kab. Dompu yang menghendaki penerapan SRG sebagaimana diterapkan di Kab. Sumbawa dan Lombok Timur.

Aspirasi petani Dompu itu disampaikan Kepala Biro Ekonomi, Setda NTB, Selly Andayani kepada Gubernur NTB, untuk disikapi sekaligus mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) terkait. Hal itu dikarenakan Dompu merupakan salah satu kabupaten di wilayah NTB yang menjadi sentra produksi jagung, selain komoditi pangan lainnya.

Ditambahkan Imam, Gubernur pun langsung menginstruksikan kepada Kepala Disperindag NTB untuk mengawal proses pembangunan gudang untuk penerapan SRG itu. SRG merupakan metoda perdagangan tunda jual.

“Petani dapat memasukkan hasil komoditinya dalam gudang itu dan mendapatkan resi gudang yang dapat diuangkan maksimal 70 % dari nilai komoditi tersebut, penentuan harga atas komoditi akan dilakukan saat penjualan pada kondisi harga yang diharapkan,” katanya.

Menurut Imam, saat ini tengah disiapkan lokasi pembangunan gudang representatif itu dengan dukungan APBN sebesar Rp 3 miliar.

“Mudah-mudahan pembangunan gudang itu lancar, agar akhir tahun nanti atau paling tidak awal tahun 2014 sudah bisa diterapkan SRG di Dompu,” harap Imam.

Pemerintah sudah menerapkan SRG

di Pulau Lombok (Lombok Timur) dan di Pulau Sumbawa (Kab. Sumbawa). SRG itu sudah diterapkan PT Bhandha Ghara Rekha (BGR) di Pulau Lombok, yang mencakup enam jenis komoditi yakni jagung, gabah, beras, kopi, coklat dan rumput laut.

Pemerintah kemudian memperbanyak lokasi penerapan SRG di wilayah NTB, setelah di Lombok diterapkan di Kab. Sumbawa dengan dukungan dana APBN Perubahan 2010 sebesar Rp 3 miliar. Semula, dukungan anggaran untuk SRG di Kab. Dompu, diupayakan dukungan APBN Perubahan 2011 namun baru teralokasi pada APBN 2013.

Penerapan SRG di Bage Tango, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa itu diawali dengan pembangunan gudang representatif seluas 700 meter persegi berkapasitas 3.000 ton. Pembangunan gudang SRG itu melibatkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pengembangan SRG itu diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2006, yang kemudian diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2011, tentang Sistem Resi Gudang. ▲



Bappebti Tagih Janji Pemprov Penyelenggara PLKA

Sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah diperlukan untuk mendongkrak kinerja PLKA yang kini semakin terpuruk. Terkait itu, Bappebti pun tidak tinggal diam dan akan menagih janji-janji Pemprov penyelenggara PLKA. Ancamannya PLKA akan ditutup!



Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya membuka pertemuan teknis PLKA 2014.

Pembenahan guna mengoptimalkan kinerja Pasar Lelang Komoditi Agro (PLKA) memang sudah sepatutnya harus dilakukan. Pasalnya, kinerja PLKA yang diselenggarakan di 13 propinsi semakin mengalami penurunan. Baik itu berdasarkan frekuensi pelaksanaan pasar lelang, ragam atau jenis komoditas yang dilelang, ataupun dari total transaksi dan jumlah peserta pasar lelang.

Untuk itu, Badan pengawas Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan selaku pembina dan pengawas pasar lelang menggelar pertemuan teknis PLKA di Batam, 26 Maret 2013 lalu. Dalam pertemuan tersebut, dihadiri pejabat dan staf Bappebti serta perwakilan dari 13 propinsi penyelenggara PLKA.

Menurut Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Bappebti, Kemendag, Ismadjaja Toengkagie, inti dalam pertemuan teknis itu, Bappebti meminta komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan PLKA. "Kami akan menutup PLKA di daerah tersebut, jika pemda yang bersangkutan tidak punya komitmen," tegas Ismadjaja, Maret lalu.

Untuk diketahui, saat ini jumlah PLKA yang tersisa hanya 13 pasar lelang. Diantaranya, PLKA di Propinsi Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.

Lalu, bagaimana hasil dari pertemuan teknis tersebut? Ismadjaja mengatakan, sebanyak 8 PLKA yang belum direvitalisasi diantaranya di Propinsi Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Yogyakarta, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.

"Delapan PLKA tersebut akan mulai mempersiapkan proses revitalisasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2014," katanya.

Untuk mempermudah dan mempercepat proses revitalisasi, jelas Ismadjaja, Bappebti akan memberikan pedoman pelaksanaan revitalisasi PLKA yang menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun perangkat revitalisasi PLKA di daerah. "Acuan tersebut diantaranya Peraturan Tata Tertib Nasional, Trading Rules, dan skema perjanjian," jelasnya.

Selain itu, Peraturan Menteri Perda-

ngan dan Perindustrian No. 650/MPP/Kep/10/2004, tentang ketentuan penyelenggaraan pasar lelang dengan penyerahan kemudian, akan dilakukan revisi paling lambat akhir tahun 2013.

Dan, kata Ismadjaja, pelaksanaan revitalisasi PLKA dilakukan dengan pendanaan dari APBN dan didukung oleh APBD secara bersinergi. Selain itu, penyelenggaraan pasar lelang juga harus mengarah kepada kemandirian sehingga penyelenggara harus mengambil langkah-langkah terobosan guna menutupi biaya operasional dan mampu mengembangkan bisnisnya sendiri.

Informasi Terintegrasi

Di sisi lain, Bappebti juga akan mengembangkan sistem informasi pasar lelang yang terintegrasi. Pasalnya, pasar lelang harus memiliki sistem informasi yang dapat mendukung pelaksanaan dan perluasan cakupan pasar lelang. "Hal tersebut diawali dengan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pasar lelang dan mengarah pada pasar lelang online yang terintegrasi," imbuhnya.

Lebih lanjut Ismadjaja mengatakan, Peraturan Kepala Bappebti terkait dengan pemberian persetujuan lembaga penyelenggara pasar lelang juga akan ditinjau ulang. Dan, Bappebti akan melakukan pengkajian khususnya mengenai modal disetor sebesar Rp 1 miliar khususnya bagi koperasi.

Singkatnya, untuk memperkuat dan mendorong optimalnya pelaksanaan pasar lelang perlu adanya dukungan kebijakan dan peraturan di pusat dan di daerah. "Hal itu untuk memanfaatkan pasar lelang dalam lalu lintas perdagangan komoditi unggulan," pungkas Ismadjaja. ▲



Bali 2014 PLKA Online

Bappebti bukanlah sebagai regulator perusahaan-perusahaan investasi emas bodong. Pasalnya, investasi fisik emas tidak termasuk dalam skema perdagangan berjangka komoditi seperti diatur UU No.10 Tahun 2011.

Harapan Pemerintah Daerah Bali untuk mewujudkan pasar lelang komoditi agro (PLKA) berbasis online nampaknya akan dapat terealisasi. Pasalnya, sejumlah kalangan di Bali telah memberikan dukungan agar PLKA berbasis online ini dapat segera terwujud pada tahun 2014.

Rencana PLKA berbasis online ini memang sudah digagas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bali pada akhir 2012 lalu. Dan kini, perihal tersebut mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali. Bahkan, menurut Ketua Komisi II DPRD Bali, Tutik Kusuma Wardani, pihaknya justru ikut mendesak Pemda Bali untuk segera mewujudkan sistem PLKA berbasis online pada 2014 mendatang.

“Sistem perdagangan online diproyeksi sangat membantu pemasaran komoditas Bali yang lebih mumpuni guna mempertahankan neraca ekspor Bali terus menurun,” kata Tutik, di Denpasar Bali, Februari lalu.

Diakui Tutik, ekspor Bali memang terus mengalami penurunan seiring

lesunya perekonomian negara tujuan ekspor tradisional. Untuk itu, metode online menjadi salah satu upaya revitalisasi pasar lelang yang juga bermanfaat menekan turunnya angka ekspor Bali.

Sistem perdagangan online, papar Tutik, sangat potensial sepanjang dikerjakan secara intensif. Pada konsep ini, akses pasar bagi pelaku usaha di Bali bisa terakomodasi secara mudah, dan efisien. “Disperindag bisa memanfaatkan situs yang telah disediakan pemerintah guna mempermudah segala kepentingan dan membuka peluang berkembang bagi pelaku usaha di Bali,” katanya.

Meski begitu, lanjut Tutik, pengelolaan pemasaran online dinilai belum akan berjalan mulus tanpa didukung kesiapan sumber daya manusia. “Banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti apa itu sistem perdagangan komoditas online.”

Untuk itu, Tutik mengimbau kepada Disperindag Bali, untuk benar-benar membantu pemasaran petani lokal. “Dengan sistem ini, pembeli tak perlu lagi jauh-jauh datang ke Bali, hanya untuk membeli produk. Jadi, pemasaran

produk lokal lebih mudah dan hasilnya maksimal,” jelas Tutik.

Sementara itu, Kepala Disperindag Bali, Ni Wayan Kusumawathi, mengatakan, proyek ini akan dilakukan secara bertahap dengan pembangunan infrastruktur fisiknya, seperti gudang sebagai tempat penyimpanan stok.

“Pasar lelang akan dilaksanakan berkelanjutan untuk membentuk harga yang transparan dan memfasilitasi petani dan perajin untuk mengakses pasar. Selain itu, pasar lelang juga diproyeksikan sebagai penjamin stabilitas harga ditingkat pasar sesuai dengan pola tanam,” katanya.

Menurut Ni Wayan, PLKA juga dipastikan mampu mengurai hambatan terbatasnya akses pasar yang selama ini dialami petani. Secara garis besar, paparnya, pasar komoditas yang dioperasikan secara online diharapkan mampu menekan biaya transaksi yang dikeluarkan dari pola perdagangan tradisional. “Jadi pembeli tidak harus datang ke Bali untuk dapat membeli komoditas asal Bali,” tutup Ni Wayan Kusumawathi. ▲

Kinerja PLKA Februari

Tahun Anggaran 2013, pelaksanaan Pasar Lelang Komoditi Agro (PLKA) yang dibiayai melalui Dana Dekonsentrasi dilaksanakan di sebanyak 13 propinsi dan program tersebut diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah propinsi yang membidangi perdagangan dalam negeri (dinas bidang perdagangan).

Sepanjang bulan Februari 2013 lalu, telah diselenggarakan sebanyak dua kali penyelenggaraan PLKA yakni di Propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan nilai transaksi mencapai sebesar Rp 29.518.000.000,-.

Transaksi jual-beli pada penyelenggaraan PLKA di

Jawa Timur dilakukan oleh 80 penjual dan 13 pembeli, dengan komoditi yang ditransaksikan sebanyak 9 jenis meliputi komoditi sapi, kemiri, tomat, beras, coklat, kubis, jagung, sayuran, dan kacang.

Sedangkan penyelenggaraan pasar lelang di Jawa Tengah dilakukan oleh sebanyak 49 pihak penjual dan 13 pembeli. Komoditi lokal yang ditransaksikan terdapat sebanyak 9 jenis meliputi komoditi beras, tomat, kentang, jagung, jambu, kubis, bawang merah, tepung, dan ikan. Transaksi yang mencetak nilai transaksi terbesar yakni ternak sapi dengan nilai transaksi sebesar Rp 15.300.000.000,-.



Agenda Foto



Mendag Gita Wirjawan usai membuka Rakernas Kementerian Perdagangan memberi keterangan kepada wartawan didampingi jajaran Eselon I Kementerian Perdagangan. Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya menjadi salah satu narasumber pada Rakernas tersebut. **Jakarta, 13-16 Maret 2013.**



Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya menyampaikan arahan dalam pertemuan teknis revitalisasi pasar lelang. Untuk meningkatkan intensitas dan kualitas transaksi pasar lelang direncanakan sebanyak 8 pasar lelang akan direvitalisasi pada tahun 2014. **Batam, 25-27 Maret 2013.**



Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya usai membuka Monex Investment Club 2013, berdialog dengan narasumber. Kegiatan ini rutin diselenggarakan Monex sebagai ajang edukasi dan sosialisasi di bidang perdagangan berjangka komoditi. **Jakarta, 2 Maret 2013.**





Wamendag Bayu Krisnamurthi didampingi Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya berdialog dengan pelaku industri pakan ternak Jateng. Pada dialog tersebut Wamendag mengutarakan dan mengharapkan Kab. Grobogan sebagai tolak ukur perdagangan komoditi jagung tingkat nasional. Pada kunjungannya Wamendag dan Kepala Bappebti meninjau pabrik pakan ternak PT. Japfa Comfeed. **Semarang, 7 Maret 2013.**



Wamendag Bayu Krisnamurthi mengunjungi gudang SRG di Desa Dapurno Kec. Kilosari Kab. Grobogan. Usai melakukan kunjungan Wamendag dan Kepala Bappebti didampingi Bupati Grobogan Bambang Pujjiono berdialog dengan pelaku SRG. **Grobogan, 8 Maret 2013.**



Peluncuran Kontrak Batuabara JFX Tunggu Kesiapan Pelaku



Jakarta Futures Exchange (JFX) semula merencanakan peluncuran kontrak berjangka komoditi batubara pada kurun waktu semester pertama tahun 2013, namun rencana itu harus ditunda disebabkan belum adanya dukung dari konsumen pengguna ba-

tubara di dalam negeri. Meski demikian, JFX tetap berupaya melakukan pendekatan ke berbagai pihak agar kontrak berjangka batubara kelak bisa diperdagangkan.

Direktur JFX, Bihar Sakti Wibowo, dalam sebuah kesempatan baru-baru ini mengatakan, penundaan peluncuran kontrak berjangka batubara bukan disebabkan rendahnya harga batubara di pasar internasional. "Justru seharusnya saat harga dunia rendah, instrumen perdagangan berjangka sangat diperlukan sehingga konsumen bisa melakukan lindung nilai jika nantinya harga melonjak tinggi."

"Jadi penundaan peluncuran kontrak batubara JFX tidak ada kaitannya turunnya harga di pasar internasional. Penundaan itu sifatnya lebih kepada persiapan dan perundingan baik di internal maupun eksternal," jelas Bihar.

Lebih jauh dikatakan Bihar, kendala

utama persiapan kontrak batu bara ini adalah permintaan yang beragam dari perusahaan yang berbeda-beda. Jadi, JFX harus bisa mengambil keputusan untuk menyelaraskan berbagai permintaan. "Sehingga dengan berbagai permintaan tersebut, JFX melonggarkan target peluncuran komoditas batubara menjadi pada semester ke II tahun ini."

"Kami juga menginginkan rencana peluncuran kontrak berjangka batubara diikuti dengan perdagangan pasar fisiknya. Sehingga para pelaku terutama konsumen pengguna mempunyai alternatif bertransaksi baik di pasar fisik maupun futures. Target pasar dari komoditas ini, tentu pelaku pasar yang terkait batu bara, seperti PLN misalnya, dengan adanya kontrak berjangka ini bisa dijadikan PLN sebagai lindung nilai. Selain itu, tentunya industri yang menggunakan energi listrik bersumber batubara," jelas Bihar Sakti Wibowo. ▲

Izin Usaha JTB 'Seumur Jagung' Dibekukan Bappebti

PT. Jireh Trillions Berjangka (JTB) perusahaan pialang berjangka anggota Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) tertanggal 21 Januari 2013 lalu, izin usahanya dibekukan Bappebti dengan Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 1996/Bappebti/SA/01/2013. Pembekuan kegiatan usaha itu dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesuai surat Komisaris Utama PT. Jireh Trillions Berjangka.

Salah satu alasan permohonan komisaris perusahaan pialang anggota BKDI yang tercatat sejak Juli 2012 lalu itu, mengatakan, bahwa di dalam melakukan operasionalnya sebagai perusahaan pialang tidak adanya kepenguru-



san manajemen.

Di samping itu, sesuai hasil penilaian Bappebti perusahaan bersangkutan tidak dapat mempertahankan integritas keuangan, reputasi bisnis, dan melalalkan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.

Dengan dibekukannya kegiatan usahanya tersebut Bappebti juga membekukan semua izin Wakil Pialang Berjangka pada JTB. Pembekuan kegiatan usaha ini dapat dicairkan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi. ▲



Izin RF Dibekukan 'Tidak Cakap' Sebagai Pialang

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesuai hasil audit Bappebti dan laporan hasil audit khusus Jakarta Future Exchange (JFX) bersama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), dinyatakan perusahaan pialang anggota JFX atas nama PT Reymount Futures (RF) izin usahanya dibekukan.

Hasil audit tersebut antara lain menyatakan bahwa RF diketahui melakukan penyalahgunaan dana nasabah pada rekening terpisah, tidak dapat memenuhi kewajiban minimum mengenai jumlah modal disetor, mempekerjakan tenaga kerja asing yang berhubungan langsung

dengan calon nasabah dalam rangka transaksi, dan beroperasinya Kantor Cabang Bandung belum mendapat persetujuan resmi dari Bappebti.

Di samping itu, RF juga tidak dapat mempertahankan integritas keuangan, reputasi bisnis dan melalaikan kewajiban penyampaian laporan keuangan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.

Menindaklanjuti keputusan Bappebti itu, JFX juga menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) kepada PT Reymount Futures tertanggal 6 Februari 2013. Pembekuan SPAB terhadap RF dilakukan berdasar Surat Keputusan

Kepala Bappebti No. 2025/Bappebti/SA/02/2013 yang telah membekukan kegiatan usaha sebagai perusahaan pialang berjangka.

Dengan dibekukannya kegiatan usahanya, RF tidak dapat menggunakan hak keanggotaannya selama masa pembekuan tersebut. Sedangkan posisi terbuka milik nasabah RF harus dialihkan ke pialang lain yang bersedia menerimanya. Apabila dengan alasan tertentu posisi terbuka nasabah tidak dapat dilaksanakan, maka JFX dapat memerintahkan melikuidasi semua posisi terbuka tersebut. ▲

Izin QF Permanen Dicabut

PT Quantum Futures (QF) perusahaan pialang anggota Jakarta Future Exchange (JFX) setelah diberi kesempatan membenahi manajemen dan aktivitasnya di bursa berjangka sejak tahun 2011, tak kunjung memenuhinya. Sehingga pada tanggal 21 Januari 2013 lalu, Bappebti mencabut izin usaha sebagai Pialang Berjangka atas nama PT Quantum Futures. Pencabutan ini didasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 1998/Bappebti/SA/01/2013.

Pencabutan Izin Usaha dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa sejak diterbitkannya Surar Keputusan Kepala Bappebti No. 1250/Bappebti/SA/03/2011 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Bappebti No. 514/Bappebti/SA/12/2008 tentang pencabutan izin usaha untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai Pialang Berjangka Atas Nama PT Quantum Futures pada tanggal 16 Maret 2011.

Di samping itu, Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) PT. Quantum

Futures yang diterbitkan oleh Jakarta Futures Exchange juga telah dicabut yang disebabkan perusahaan tidak memenuhi persyaratan sebagai perusahaan Pialang Berjangka sesuai dengan ketentuan.

Dengan dicabutnya izin usaha tersebut, maka Bappebti juga mencabut seluruh izin Wakil Pialang Berjangka yang ada pada PT. Quantum Futures. ▲

Penyegaran WPB Belum Optimal

Bappebti pada 27-28 Februari 2013 lalu, di Kuta Bali, menyelenggarakan kegiatan ujian ulang kompetensi profesi Wakil Pialang Berjangka (WPB). Ujian tersebut, diwajibkan oleh Bappebti untuk seluruh WPB yang izinnya telah berusia minimum tiga tahun. Tujuannya, yaitu untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan wawasan WPB.

Dari sebanyak 176 WPB yang mengikuti ujian ulang WPB tersebut, hasilnya hanya sebanyak 76 orang yang di-

nyatakan lulus atau sekitar 43,1 %.

Kepala Biro Perniagaan, Bappebti, Robert J. Bintaryo, mengatakan, ada tiga kesimpulan yang dapat diambil dari ujian tersebut. "Pertama, membuktikan pengujian WPB yang telah memiliki izin tiga tahun memang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas."

Kedua, kata Robert, hal ini membuktikan bahwa perlu dilakukan secara terus menerus penyegaran dan pelatihan bagi WPB. Dan ketiga, perlu adanya kerjasama dengan bursa, lembaga

kliring dan asosiasi untuk melakukan pembinaan kepada WPB.

"Dari hasil yang belum mengembirakan itu, membuktikan kepada kita bahwa penyegaran WPB selama ini belum optimal. Pasalnya, penyegaran tersebut belum dilakukan pada level pimpinan perusahaan pialang. Selama ini yang mengikuti penyegaran WPB hanya di tingkat staf atau manajerial, sedangkan di level pimpinan perusahaan belum optimal," pungkas Robert J. Bintaryo. ▲

50 % Karet Sumsel Tak Sesuai Standar Eskpor

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Sertifikasi Pengawasan Mutu Barang, Sumsel, Soni Maharani, mengatakan, setiap karet yang masuk ke Sumsel dilakukan sertifikasi mutu barang. Dari sertifikasi itu ditemukan mayoritas tidak memenuhi standar ekspor. Tidak heran, harga jual karet itu lebih rendah dibanding karet asal negara lain sekitar tiga hingga lima sen per kg.

“Sekitar 50 % karet yang kita uji, hasilnya tak memenuhi standar ekspor,” ujarnya kepada wartawan. Dia mengatakan, tingkat kebersihan karet petani di daerah ini sangat rendah. pasalnya, parah petani terbiasa menggunakan air keras dalam pengolahan karet mereka. Padahal sangat di larang karena dapat mempengaruhi mutu barang.

“Harusnya digunakan bahan kimia khusus agar karet yang dihasilkan bersih. selama ini petani kita terbiasa pakai cuka parah,” ungkapnya. Menurut dia, selama ini Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel sudah sering kali menyosialisasikan bagaimana mengolah karet yang bermutu dan standar ekspor. Hal ini untuk meningkatkan daya jual di pasaran internasional.

“Bimbingan teknis, penyuluhan, dan sosialisasi sangat sering dilakukan. Hasilnya belum maksimal,” kata dia. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel Benjamin menambahkan, meski kualitas karet petani sangat rendah, pabrik tidak punya pilihan lain kecuali tetap menerima karet itu. Sebab kapasitas pabrik belum sebanding dengan suplai.

Menurut Soni, solusi terbaik yang harus dilakukan yakni pabrik dengan kompak tidak membeli karet kotor dan mengutamakan karet bersih dengan harga yang lebih mahal. Dengan demikian, petani mau tak mau merubah kebiasaannya untuk memenuhi standar yang berlaku.

“Petani kita tahu jika karetnya kotor. Tapi, harga karet bagus dan kotor tidak terlalu berbeda. Jadi, mereka tetap mempertahankan kebiasaannya itu. Di sinilah diperlakukan kekompakan pabrik,” kata Soni. ▲

Kakao Pidie Kualitas Rendah Harga Merosot



Petani kakao di Provinsi Aceh terpuruk akibat harga tampung komoditas itu turun drastis di pasar lokal yang berkisar antara Rp 16 ribu hingga Rp 20 ribu per kg. Ketua kelompok tani Moen Dara Baro Padang Tiji, Kab. Pidie, M Nasir, di Banda Aceh, mengatakan, merosotnya harga tampung kakao di tingkat petani dipengaruhi oleh kualitas.

“Kualitas yang dijual petani sama halnya dengan kualitas sebelumnya yakni dengan kadar air sekitar delapan sampai sepuluh persen. Kami tidak tahu kenapa harga itu bisa turun drastis tetapi kuliatas

kakao yang dijual petani untuk penampung tingkat ekspor sama dengan sebelumnya,” katanya.

Padang Tiji yang memiliki jarak sekitar 92 kilometer arah timur Kota Banda Aceh itu merupakan salah satu daerah sentra produksi kakao di Aceh dengan lahan produktif sekitar ratusan hektare.

Nasir berharap harga komoditas itu dapat naik kembali, sehingga masyarakat yang penghasilnya tergantung pada kakao dapat meningkatkan pendapatannya di masa mendatang.

“Minat masyarakat menjadi petani kakao sangat tinggi hal ini dipengaruhi oleh harga yang cukup menjanjikan di pasar internasional,” katanya.

Provinsi Aceh memiliki lahan kakao produktif sekitar 70.000 hektare dengan rata-rata produksi 400-500 kg per hektare. Lahan kakao tersebut tersebar di delapan daerah sentra produksi diantaranya Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tenggara. ▲

Gagal Panen Negara Produsen Dorong Harga Kedelai Naik



Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, faktor yang menjadi penyebab masih tingginya harga kedelai di dalam negeri secara umum karena tidak seimbangnya pasokan dan permintaan di pasar internasional.

Harga kedelai impor di dalam negeri pada akhir 2012 adalah Rp 6.000 per kg sedangkan saat ini melonjak naik menjadi Rp 8.000 per kg. Lebih spesifik, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga kedelai di dalam Negeri.

Pertama, kata Bayu, adalah kegagalan panen di daerah produsen, seperti Brasil, Argentina, dan Amerika Serikat. Faktor kedua adalah melonjaknya permintaan kedelai dari China. Tahun lalu, China

mengimpor sekitar 60 juta ton kedelai dari sejumlah negara produsen.

Kenaikan harga kedelai berdampak pada turunnya produksi tahu dan tempe di karenakan permintaan terhadap dua jenis barang cenderung menurun di masyarakat. Harga kedelai yang merangsek naik tersebut sangat dirasakan oleh para pedagang tahu tempe. Pengrajin terpaksa sedikit menaikkan harga tempe yang dijual per 500 gram dengan harga Rp 6.000. Tempe dengan 300 gram dijual Rp 5.000. Harga tahu per potong seberat 300 gram naik dari Rp 2.500 menjadi Rp 3.000.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah segera menerapkan harga pembelian pemerintah (HPP), kebijakan itu tinggal menunggu peraturan presiden sebagai payung hukum. Pemerintah akan menetapkan dua HPP, yakni HPP pembelian dan HPP penjualan. HPP pembelian adalah patokan harga minimal saat Perum Bulog membeli kedelai dari petani, sementara HPP penjualan adalah patokan harga minimal saat Bulog menjual kedelai ke perajin tahu-tempe. ▲



Coftra's version on Illegal Broker

Coftra Chief, Syahrul R. Sempurnajaya, recently explained on a occasion that there are 2 categories of illegal broker in Indonesia nowadays who offered investment products. First is local illegal company, this company does all operational activities through out Indonesia territory.

This local broker characteristic is mixed and un organised. On each of their transaction the lot number is vary from lot with minimum value of margin to margin worth of billion rupiahs.

"From the activity, the local illegal broker is very vary and not focusing on financial transaction only such as forex, and index or loco London but also acts as investment management company who veiled collecting people fund and then invested in to activities outside futures trading industry activities such as mining, housing, timber and others," Syahrul explained.

The second kind is foreign illegal company. This company has an overseas

operational control but they do the activity in Indonesia.

The activities are structured, complete and electronically (online) from the opening of customer account, the filling and mandate agreement document signing and the lot transaction is relatively small.

"As all activities were done online, this foreign company targeted middle upper market segment or society who has access to online media," He said.

Commonly the foreign illegal broker does not have official office. They only hire small office building as prospective customer training centre.

The company's target is eastern countries such as China, Malaysia, Vietnam and Indonesia, Africa and Latin America.

"This foreign illegal broker usually appears as selling agent or freelance seminar organizer for investment activities but they are very effective in offering contract via internet such as website, e-mail, twitter, facebook, google, yahoo and others," Syahrul R Sempurnajaya explained. ▲

Coftra revitalizes 13 Agro Commodity Auction Market (PLKA)

Coftra targets revitalization of 13 agro commodity auction market (PLKA) in Indonesia. The aims is to create a professional and independent auction market organizer. So far, there were 5 areas already included in auction market revitalization program, which are East Java, West Java, Middle Java, Bali and South Sulawesi.

"We can not just sit and watch the auction market faintly dead," Ismadjaja said.

Moreover, according to Ismadjaja, the effort for revitalization is a way to raise PLKA transaction volume that decrease from year to year.

So far, PLKA implementation is organized by the local Trading and Industrial Bureau. Due to limitation on man power of the bureau, the PLKA can not run maximum.

"They routine responsibility is already a lot, if they have to manage the PLKA it will be impossible," he said.

With the revitalization of PLKA, the auction market will be handed over to a professional private company so that it can be more beneficiary and maximized in function.

It can be from a private sector, union or even district business entities," Ismadjajs Toengkagie said. ▲

Trading Ministry set salt commodity as warehouse receipt system subject.

The trading ministry on the last 11th of February has published the new policy of warehouse receipt system. As regulated in Law Number 9/2011 in regards to Law Number 9/2006 on warehouse receipt system, the trading minister has an authority to decide which commodity can be included into warehouse receipt system scheme.

The trading ministry policy on that warehouse receipt system has established salt commodity as warehouse receipt system warranty.

This policy is contained in trading ministry policy No. 08/M-Dag/Per/02/2013 in regards to changes on trading ministry law No. 37/M-Dag/Per/11/2011 on commodity that can be stored at the warehouse under warehouse receipt system.

The salt commodity entry in warehouse receipt system scheme is adding the long list of commodity that can be warranted to get alternative funding from financial institution.

The commodity that have been appointed by the trading ministry are unhulled rice, rice, corn, cocoa, coffee, pep-

per, rubber, seaweed, ratan and the last is salt commodity.

The chief of coftra physical and service market bureau, Ismadjaja Toengkagie, just before the policy was published has revealed that salt warehouse receipt system is just waiting for the appointment from trading ministry policy.

"If the trading ministry policy has been published, the salt warehouse receipt system can be implemented. Specially Garam Pty Ltd as the candidate for administrator of the salt farmer and warehouse has been waiting for the implementation of salt warehouse receipt system."

The problem is that Garam Pty Ltd is lacked of liquidation to buy salt from the farmer. On the other hand the price of consumed salt at farmer's level is still far from government buying price for IDR 750 per KG. While on the farmer's side the salt price is only about IDR 200 per KG.

Ismadjaja added that salt warehouse receipt system is planned to be implemented in 3 regencies in Madura which are Sampang, Pamekasan and Sumenep. ▲





Info SRG

Memasuki bulan kedua 2013, petani kembali memanfaatkan SRG sebagai sarana tunda jual dengan pembiayaan dari perbankan sambil menunggu naiknya harga komoditi. Pada bulan Februari lalu penerbitan resi gudang dilakukan di Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, Jatim. Komoditi milik perseorangan yang masuk gudang SRG itu yakni gabah jenis Cihayang dengan kadar air 13 % dengan volume 100,5 ton.

Seperti tampak pada Tabel Penerbitan Resi Gudang Bulan Februari 2013, pada bulan Februari hanya terdapat 1 komoditi yang masuk disimpan dalam Gudang SRG. Tidak banyaknya penerbitan Resi Gudang pada bulan Februari disebabkan karena belum mulainya musim panen di berbagai daerah sehingga harga komoditi masih cenderung tinggi, sehingga pemilik komoditi belum memiliki komoditi ataupun apabila memiliki akan cenderung langsung melakukan penjualan.

Stok Komoditi SRG

Sepanjang Februari 2013, gudang SRG masih menyimpan komoditi dengan Resi Gudang yang diterbitkan pada akhir tahun 2012, seperti tercatat di daerah Indramayu, Banyuwangi, Sidrap, Pinrang, Mojokerto, Jombang, Cianjur, Ngawi, Sumedang, Ciamis, Lombok Barat, Tuban, Barito Kuala maka pada periode Februari 2013 masih terdapat 64 resi gudang aktif (barang masih disimpan di gudang SRG) untuk komoditi Gabah, Jagung dan Kopi dengan total volume sebesar 2.271 ton yang terdiri dari Gabah sebanyak 2.213,22 ton, Jagung sebanyak 42,49 ton dan Kopi sebanyak 15 ton. Penyimpanan komoditi tersebar di 15 kabupaten/kota dengan rincian seperti tampak pada tabel Ketersediaan Stok Komoditi Dalam Gudang SRG Bulan Februari 2013.

Pembiayaan SRG

Pada Februari 2013, resi gudang yang diterbitkan hanya ada 1 resi yang pembiayaan dilakukan Bank Jatim, Cabang Nganjuk, dengan total nilai pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 351.750.000 atau sebesar 70 % dari nilai resi gudang. Pembiayaan ini diberikan dengan bunga komersial (tidak menggunakan Skema Subsidi Resi Gudang), karena dengan skema subsidi untuk petani perorangan maksimal hanya dapat diberikan sebesar Rp 75.000.000.

PENERBITAN RESI GUDANG BULAN FEBRUARI 2013

NO.	PENGELOLA GUDANG / GUDANG	Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Jumlah Komoditi (Ton)	Harga Rata-Rata (Rp. /kg)	Nilai Barang (Rp)
1.	PT. PERTANI					
	- Gudang Nganjuk Rejoso	Gabah	1	100,5	5.000	502.500.000
JUMLAH		Gabah	1	100,5	5.000	502.500.000
TOTAL			1	100,5		502.500.000

*Sumber: BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI

PEMBIAYAAN RESI GUDANG BULAN FEBRUARI 2013

NO.	PENGELOLA GUDANG / GUDANG	Komoditi	Resi Gudang Terbit	Nilai Barang (Rp)	RG Diagunkan	Nilai Pembiayaan (Rp)	Bank/LKNB
1.	PT. PERTANI						
	- Gudang Nganjuk Rejoso	Gabah	1	502.500.000	1	351.750.000	Bank Jatim
JUMLAH		Gabah	1	502.500.000	1	351.750.000	
TOTAL			1	502.500.000	1	351.750.000	

*Sumber: BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI



**KETERSEDIAAN STOK KOMODITI DALAM GUDANG SRG
BULAN FEBRUARI 2013**

NO.	PENGELOLA GUDANG / GUDANG	VOLUME KOMODITI (TON)		
		GABAH	JAGUNG	KOPI
1.	Kab. Indramayu			
	- Haurgeulis (Pertani)	264,55		
2.	Kab. Cianjur			
	- Warungkondang (Pemkab)	151,63		
3.	Kab. Ciamis			
	- Cisonrol (Pertani)	60		
4.	Kab. Jepara			
	- Pecangaan (Pemkab)	7,95		
5.	Kab. Mojokerto			
	- Ngoro (Pertani)	336		
6.	Kab. Jombang			
	- Mojoagung (Pertani)	445		
7.	Kab. Nganjuk			
	- Rejoso	100,5		
8.	Kab. Banyuwangi			
	- Muncar (Pertani)	104		
9.	Kab. Lombok Barat			
	- Kediri (Pertani)	405,2		
10.	Kab. Pasaman Barat			
	- Pasaman (Pemkab)		42,49	
11.	Kab. Barito Kuala			
	- Mandastana (Pemkab)	338,39		
12.	Kab. Deli Serdang			
	- Tanjung Morawa (Gunung Lintong)			15
TOTAL		2.213,22	42,49	15

*Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI



Persiapan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang



Pengantar Redaksi: Pada artikel edisi sebelumnya, telah digambarkan bagaimana sebuah gudang untuk skema sistem resi gudang (SRG) dioperasionalkan. Berikut ini lebih jauh dijelaskan apa yang harus dipersiapkan pelaku SRG di daerah dan lembaga-lembaga yang terkait.

Para pelaku usaha di bidang SRG mencakup banyak latar belakang, tetapi dalam mengoperasionalkan sebuah unit gudang masing-masing pihak harus menjalin sinergi. Sehingga upaya dan manfaat SRG dirasakan semua pihak. Berikut ini pelaku usaha dan lembaga terkait di bidang SRG, serta perannya dalam mengoperasionalkan gudang SRG;

1. Petani/Kelompok Tani dan Pelaku Usaha lain

Bagi petani atau kelompok tani, perlu diupayakan agar komoditas yang disimpan di gudang mencapai skala ekonomis tertentu. Petani juga membuat suara pada ketua kelompok, membuat perjanjian komoditas (yakni penyimpanan, penggunaan, dan pemasaran) dengan ketua kelompok. Komoditas yang akan diresigudangkan juga harus sesuai den-

gan standar mutu yang dapat disimpan di dalam gudang.

Ketua kelompok tani dalam pelaksanaan SRG sangat memiliki peran penting dengan tugas dan fungsinya, yakni; Mengkoordinir anggota kelompok tani untuk menghasilkan komoditas dengan mutu yang baik (melalui sortasi dan pengeringan);

- Mengkoordinir anggota kelompok untuk menyimpan komoditas di gudang;
- Membuat perjanjian penyimpanan komoditas dengan pengelola gudang;
- Melakukan pengujian mutu komoditas yang akan diresigudangkan ke lembaga penguji mutu yang berada di lokasi gudang;
- Menandatangani Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang;
- Pengajuan kredit kepada perbankan dengan agunan Resi Gudang;
- Membagikan hasil pinjaman kredit kepada anggota kelompok, serta men-

gamati dan mencari informasi harga yang terbaik untuk menentukan harga penjualan terhadap komoditas yang diresigudangkan.

2. Pengelola gudang

Pengelola gudang mempunyai peran penting dalam menjaga integritas SRG. Sebab, Pengelola Gudang bertugas melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh petani/kelompok Tani dan pelaku lainnya. Dan, tugas selanjutnya Pengelola Gudang berwenang menerbitkan Resi Gudang. Untuk itu Pengelola Gudang harus mempersiapkan dan mempertahankan dukungan keuangan dan kemampuan teknis yang memadai, dan mempersiapkan sumberdaya manusia yang handal.

Sesuai dengan peraturan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/PER-



SRG/7/2007, tentang, persyaratan dan tata cara untuk memperoleh persetujuan sebagai Pengelola Gudang, berikut ini syaratnya:

Perseroan Terbatas

- Memenuhi persyaratan modal dasar paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan modal disetor paling sedikit Rp 600.000.00 (enam ratus juta rupiah);
- Mempertahankan kekayaan bersih paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus juta);
- Memiliki pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik;
- Menguasai paling sedikit 1 (satu) Gudang yang telah mendapat Persetujuan dari Bappebti;
- Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu; dan
- Memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan gudang barang.

Koperasi

- Memenuhi persyaratan modal sendiri paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta);
- Mempertahankan kekayaan bersih paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta);
- Memiliki pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik;
- Menguasai paling sedikit 1 (satu) Gudang yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti;
- Memiliki Pedoman Operasional Baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang;
- Memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan gudang dan barang; dan
- Memiliki rekomendasi dari pejabat yang berwenang dalam menilai kredibilitas koperasi di tempat kedudukan (domisili) Koperasi.

Kompetensi Pengelola Gudang

Sumber daya manusia Pengelola Gudang harus memiliki kompetensi dan profesional dibidangnya, dengan kemampuan;



- Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang;
- Memiliki keahlian karakteristik barang yang disimpan;
- Memiliki keahlian mengenai pemeliharaan barang;
- Memiliki keahlian mengenai administrasi pengelolaan gudang.

Izin Pengelola Gudang

Permohonan persetujuan izin sebagai Pengelola Gudang harus dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam peraturan kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007. Di samping itu, Pengelola gudang harus menguasai paling sedikit 1 (satu) gudang yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti. Untuk itu, Sesuai dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 02/Bappebti/PER-SRG/7/2007, tentang persyaratan dan tata cara untuk memperoleh persetujuan

sebagai gudang dalam Sistem Resi Gudang, sebagai berikut:

- Gudang harus memenuhi Ketentuan Gudang Komoditi Pertanian SNI 7331 : 2007
- Melengkapi dokumen permohonan persetujuan sebagai gudang dalam Sistem Resi Gudang yang meliputi :
 - Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan di bidang Usaha Jasa Pegudangan;
 - Fotokopi Tanda Daftar Gudang (TDG)
 - Fotokopi Sertifikat untuk Gudang dari Lembaga Penilaian Kesesuaian;
 - Fotokopi bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan gudang;
 - Fotokopi perjanjian Sewa Menyewa/Bentuk Perjanjian lain yang memberikan penguasaan terhadap gudang (apabila gudang bukan milik pengelola gudang).

Mengenal Lebih Dalam Analisis Fundamental

Indikator ekonomi makro merupakan indikator terpenting dalam analisa fundamental.

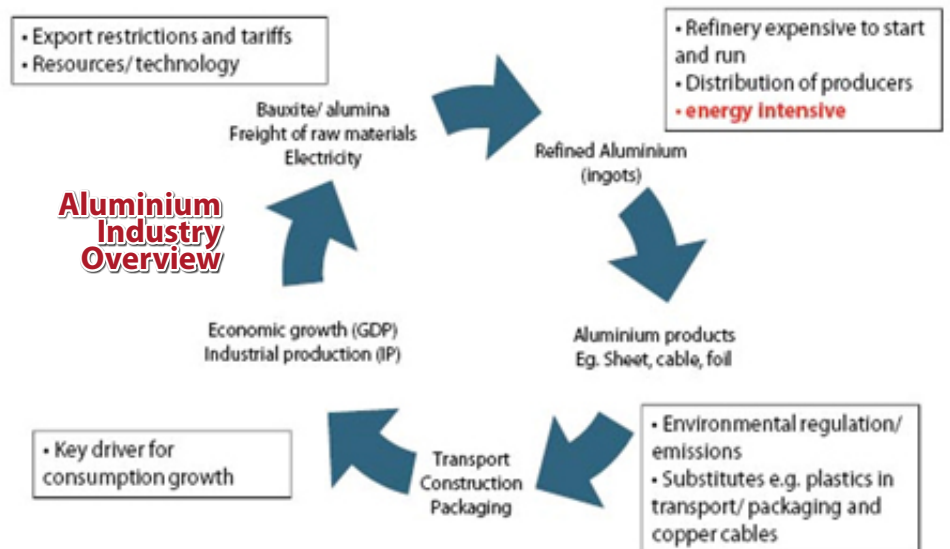
***) Apriyanto,**
Pelaksana di Sekretariat, Bappebti

Seperti yang sudah dijelaskan pada edisi sebelumnya, berikut ini penulis memberi gambaran penerapan analisis fundamental untuk komoditi aluminium. Sebagaimana diketahui, komoditi aluminium merupakan salah satu subjek kontrak berjangka komoditi yang diperdagangkan London Metal Exchange (LME).

Untuk mengaplikasikan analisis fundamental komoditi aluminium, kita terlebih dahulu mengetahui beberapa variabel yang mempengaruhinya, seperti; pembatasan ekspor dan tarif, sumber daya atau teknologi yang digunakan, biaya yang digunakan untuk pengolahan yang cukup mahal, jalur distribusi dari produsen, sumber energi yang intensive. Serta, peraturan mengenai lingkungan dan emisi, barang-barang pengganti seperti plastik dalam pengemasan dan transportasi kabel tembaga.

Agar dapat menganalisis fundamental mengenai industri aluminium, kita pun harus mengumpulkan data-data yang dibagi menjadi kelompok, yaitu data penawaran-permintaan.

Untuk memperoleh data-data tersebut dapat diperoleh melalui asosiasi in-



dustri atau kelompok penelitian untuk data permintaan dan penawaran, produsen, supplier, konsumen, stakeholder dan agen distribusi, pemerintahan, reuters, Bloomberg, LME, GTIS.

Selain data-data tersebut, kita juga perlu melengkapinya dengan data-data ekonomi makro. Sebab, indikator ekonomi makro merupakan indikator terpenting dalam analisa fundamental. Karena data itu merupakan gambaran keseluruhan dari semua faktor fundamental yang ada. Serta, semua faktor yang sudah disebutkan tadi akan tergambar ke dalam keadaan ekonomi suatu negara.

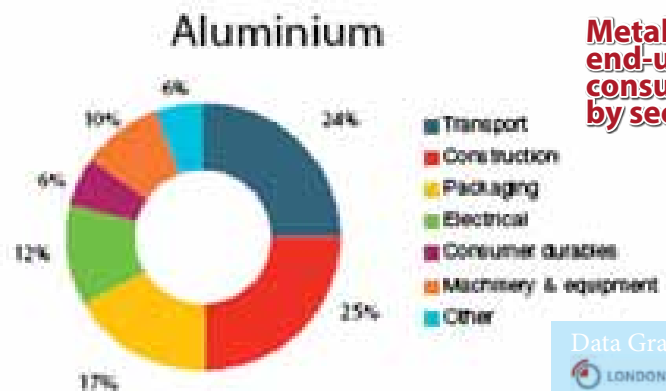
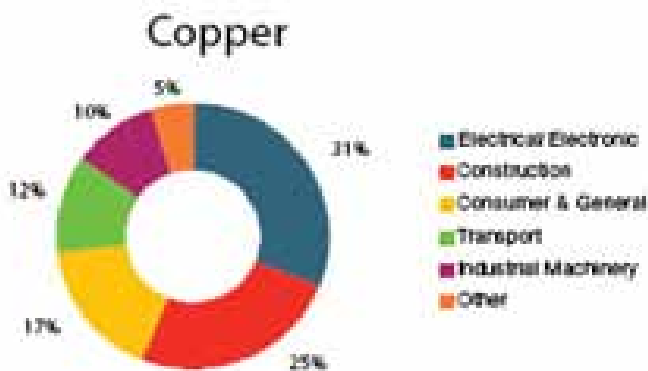
Faktor ekonomi yang mengandung semua unsur penting dalam fundamental khususnya dari sektor ekonomi, seperti Gross Domestic Product (GDP)-Produk Domestik Bruto (PDB). Data PDB ini merupakan penjumlahan dari seluruh barang dan jasa yang berasal dari pasar domestik atau dalam negeri. Produk dan jasa ini bisa berasal dari perusahaan dalam negeri maupun asing. Selama perusahaan tersebut beroperasi di suatu wilayah negara tertentu, maka pendapatannya akan dicatat sebagai PDB negara tersebut.

Berbeda dengan PDB, PNB adalah penghasilan suatu negara yang berasal dari total produk barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negaranya baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.

Selanjutnya tingkat inflasi. Data ini merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam perhitungan tingkat suku bunga (interest rate). Inflasi itu sendiri memiliki definisi melonjaknya harga-harga barang yang sifatnya relatif lama (jangka panjang) dan efeknya dapat meluas. Itu artinya tingkat inflasi merupakan ukuran atau indikator perkembangan atau pertumbuhan inflasi yang terjadi dan diukur secara periodik dalam periode waktu tertentu.

Tingkat inflasi juga merupakan cerminan dari PDB dan PNB dalam nilai yang sebenarnya yang dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam analisa fundamental. PDB dan PNB riil ini seringkali digunakan para investor sebagai pembanding antara peluang dan resiko investasinya di mancanegara.

Selain itu, indikator lain dalam tingkat inflasi yang biasanya menjadi perhatian investor, yaitu Producer Price Index (PPI) atau Indeks Harga Produk-



Metals end-use consumption by sector

Data Grafik :
LONDON METAL EXCHANGE

si. Indeks ini merupakan alat ukur atau acuan rata-rata perubahan harga yang diterima oleh produsen domestik untuk setiap output yang dihasilkan dalam setiap tingkat proses produksi. Data PPI biasanya dihimpun dari berbagai sektor ekonomi terutama sektor manufaktur, pertambangan, dan pertanian.

Kemudian Consumer Price Index (CPI) atau Indeks Harga Konsumen, yakni indeks yang digunakan untuk menghitung perubahan harga eceran yang terjadi dari setiap barang dan jasa yang diproduksi oleh kelompok tertentu.

Data lain yang juga tak kalah penting yakni, neraca pembayaran. Data ini digunakan investor untuk mengetahui posisi keuangan suatu negara, apakah negara tersebut mengalami defisit atau surplus. Neraca pembayaran ini pun terbagi ke dalam dua unsur yaitu neraca perdagangan dan neraca aliran modal.

Kemudian data tingkat pengangguran, data ini menunjukkan ratio antara jumlah lapangan kerja dan penduduk yang tidak atau belum memiliki pekerjaan namun masih dalam usia yang

produktif. Indikator ini menggambarkan kondisi riil ekonomi suatu negara. Negara dengan kondisi ekonomi yang sehat tentu memiliki tingkat pengangguran yang rendah, dan sebaliknya, jika kondisi ekonomi suatu negara tidak sehat tingkat penganggurannya pun akan cenderung tinggi.

Kurs valuta asing, indikator kurs juga merupakan gambaran dari stabilitas perekonomian suatu negara. Negara dengan stabilitas perekonomian yang bagus biasanya memiliki mata uang yang stabil pula pergerakannya. Dan, negara dengan stabilitas perekonomian buruk, mata uangnya cenderung bergerak tidak menentu dan cenderung melemah.

Terakhir data yang diperlukan yakni Public Sector Net Cash Requirement (PSNCR) atau data kebutuhan tunai sektor publik. Data ini merupakan kebutuhan pemerintah dalam memenuhi keperluan belanjanya dengan cara meminjam atau hutang. Indikator ini jarang sekali diperhatikan investor karena memang sangat jarang momentum yang tercipta dari indikator ini. ▲

Prediksi Permintaan

Salah satu keunggulan analisis fundamental sehingga banyak digunakan para pelaku pasar adalah kita bisa memprediksi momentum permintaan sesuatu komoditi. Hal itu dapat dilihat dari;

- Harga Barang, semakin rendah harga suatu barang makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit permintaan akan barang tersebut.

- Harga Barang Pengganti, kondisi atau keberadaan barang pengganti (barang substitusi) dan barang penggenap (barang komplementer) dapat menimbulkan pengaruh yang penting dalam permintaan suatu barang.

- Daya Beli, pendapatan pembelian merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan corak permintaan permintaan terhadap berbagai jenis barang.

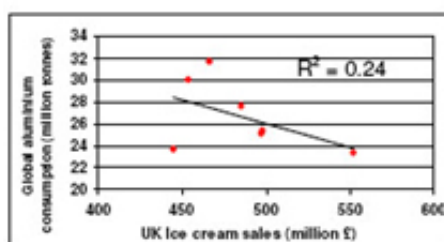
- Distribusi Pendapatan dalam Masyarakat, sejumlah pendapatan masyarakat yang tertentu besarnya akan menimbulkan corak permintaan masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda, juga jika pendapatan tersebut berubah corak distribusinya. Perubahan kebijakan Pemerintah mempengaruhi corak permintaan masyarakat.

- Tren dan Selera, tren dan selera masyarakat mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keinginan mereka membeli barang-barang.

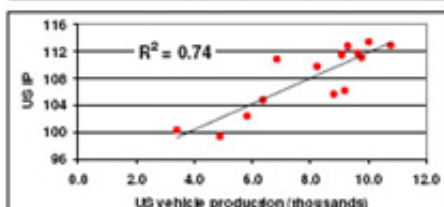
- Jumlah Penduduk, pertumbuhan jumlah penduduk yang diikuti oleh pertumbuhan jumlah angkatan kerja akan meningkatkan permintaan.

- Prediksi Perubahan Keadaan, perubahan-perubahan yang diramalkan mengenai keadaan masa akan datang dapat mempengaruhi permintaan.

Example : Correlation and R square



- Poor correlation between UK ice cream sales and aluminium consumption.
- No trend can be inferred



- US industrial production and annual vehicle assemblies well correlated – 0.74.
- The greater the IP, the more vehicles produced and therefore more metal consumed spec. Al and Cu.

Dirut PT. SIB, Yudi Indrawan

Multilateral Akan 'Sikut' Kontrak Bilateral



Bergelut di industri PBK bukanlah hal yang baru bagi Yudi Indrawan. Dari analisisnya, kontrak bilateral dalam skema SPA akan mengalami titik jenuh. Dan digantikan dengan kontrak multilateral. Benarkah?

Berapa pun lamanya jika berbincang soal industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dengan sosok yang satu ini, seakan tak pernah habis bahan pembicaraan. Tentu saja, industri PBK rupanya sudah menjadi 'sahabat' dari Direktur Utama PT Sentratama Investor Berjangka (SIB), Yudi Indrawan, sejak 16 tahun silam.

"Saya mengawali karir menjadi *market maker* untuk transaksi kontrak bilateral dalam skema Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)," papar Yudi kepada **Buletin Berjangka**, di kantornya yang berada di Plaza Indofood Tower, Lt. 10, Jln. Jend. Sudirman, Jakarta, medio Maret 2013.

Ketekunan dan kerja keras pria kelahiran Jakarta, 23 Juni 1969, ini, rupanya berbuah manis. Hal itu

terbukti dengan karirnya yang terus merangkak naik. Ia pernah dipercaya menjabat sebagai direktur operasional di sebuah perusahaan pialang berjangka. Dan terhitung sejak Mei 2012 lalu, Yudi akhirnya resmi bergabung dan menduduki posisi Dirut PT. SIB hingga sekarang.

Lantas seperti apa industri PBK di mata ayah dari tiga orang anak ini? "Industri PBK semakin berkembang dan peluang untuk mendapatkan keuntungan di industri ini sangat bagus," ujar Yudi.

Apalagi, lanjutnya, dengan berjalannya kontrak komoditi multilateral, maka akan semakin banyak produk yang akan diperdagangkan di industri ini.

Selain itu, Yudi juga memprediksi, produk SPA akan mengalami titik jenuh di masa mendatang. "Nantinya, produk



komoditi multilateral akan menjadi pilihan di masyarakat. Hal itu akan terjadi karena masyarakat akan semakin memahami benefit-nya dalam melakukan transaksi kontrak multilateral,” kata Yudi.

Untuk itu, imbuh Yudi, SIB juga terus berbenah untuk terus meningkatkan kontrak multilateral. “Kami memang tidak dapat memaksakan nasabah untuk melakukan transaksi kontrak multilateral. Tapi, kami terus menawarkan dan memberikan pemahaman kepada nasabah untuk dapat bertansaksi multilateral.”

Saat ini, SIB telah memiliki 120 tenaga marketing. Namun, Yudi mengakui, perusahaan yang dipimpinnya itu baru beroperasi di Jakarta dan belum memiliki cabang di kota lain. “Tapi kami optimis akan membuka kantor cabang pada tahun-tahun mendatang,” tegasnya.

Adapun untuk meyakinkan para calon nasabah, Yudi mengatakan, SIB merupakan perusahaan yang sudah lama berdiri dan memiliki integritas yang tinggi. Selain itu, keamanan dana nasabah terjamin karena tersimpan di dalam rekening terpisah- *segregate account* dengan jaminan perusahaan lembaga kliring. “Dana itu sangat aman, karena bisa di cek di website Bappebti dan lembaga kliring.”

Lebih jauh Yudi mengatakan, SIB juga berusaha untuk meyakinkan para calon nasabah bahwa kontrak berjangka multilateral menjadi peluang yang sangat bagus untuk diinvestasikan. Sebab itu,

di bawah komando Yudi, SIB juga rutin melakukan training kontrak multilateral baik untuk kalangan Wakil Pialang Berjangka, tim marketing maupun bakal calon nasabah.

“*Training* itu dilakukan untuk memperkenalkan produk-produk baru atau pun aturan baru dari regulator,” katanya.

Yudi juga bertekad akan membawa SIB menjadi menjadi perusahaan pialang terdepan yang masuk daftar 10 besar pialang teraktif di Indonesia. “Untuk itu, SIB akan tetap teguh menjaga kepercayaan para nasabah. Dan itu menjadi salah satu kunci dalam mengangkat perusahaan kami,” ungkapnya.

Di sisi lain, secara finansial Yudi mengaku sudah mendapatkan kenyamanan dan penghasilan yang cukup memadai selama bekerja di industri PBK. “Hingga saat ini apa yang saya peroleh dari perusahaan sudah membuat saya nyaman dan cukup untuk kesejahteraan keluarga,” ungkap pria yang sebenarnya dahulu bercita-cita menjadi dokter itu.

Meski demikian, alumni Fak. Ekonomi, Univ. Winaya Mukti, Bandung, Jabar, ini, rencananya akan meninggalkan industri PBK ketika usianya menginjak kepala 5. “Saya lahir di Jakarta, tapi di besarkan di Sumedang, Jawa Barat. Jadi, saya punya impian di masa tua ingin pulang kampung untuk berkebun dan berbudidaya ikan di sana,” ungkap Yudi Indrawan. *Semoga tercapai...* ▲

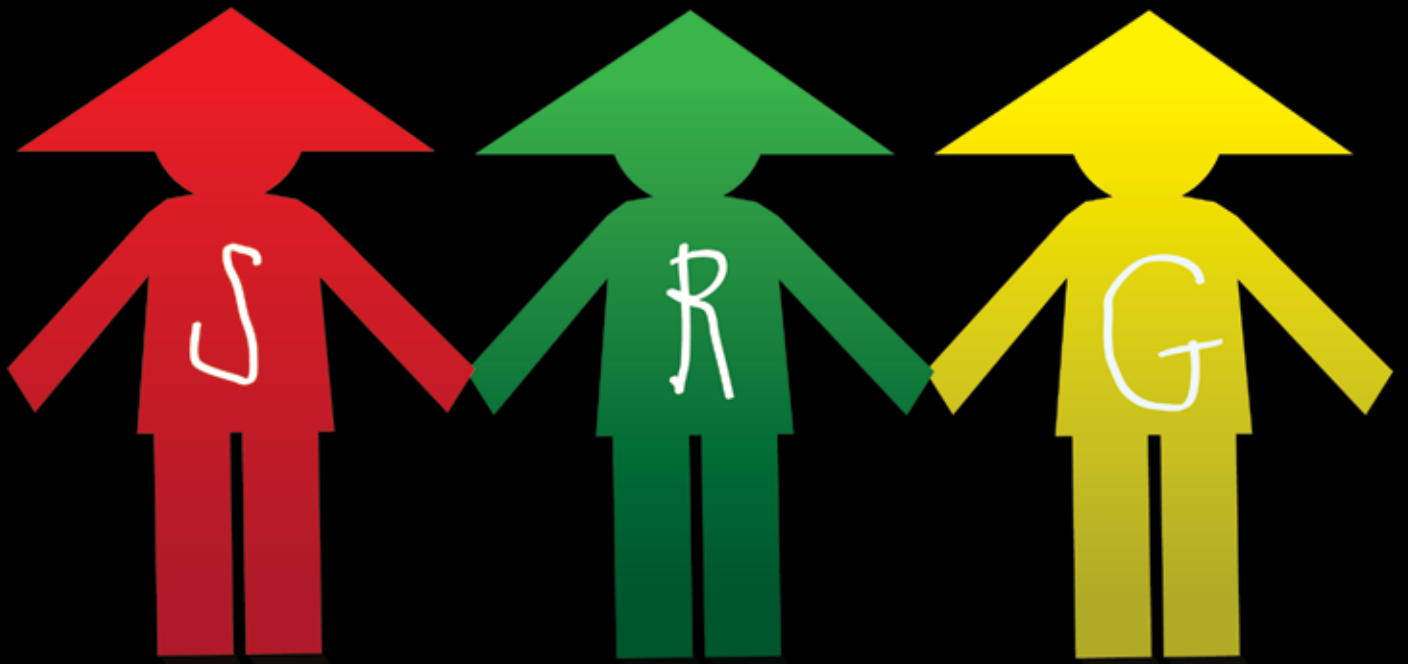
“

SIB akan tetap teguh menjaga kepercayaan para nasabah.

Dan itu menjadi salah satu kunci dalam mengangkat perusahaan kami,

”





Sistem Resi Gudang

STABILITAS HARGA
&
PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI